DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Agustino, Leo. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Anwar, M. Khoirul. (2004). *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah, SIMDA*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Edwards, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. United State of America: Congressional Quarterly Inc.

Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys*. Yogyakarta: Gava Media.

Irawan, Suhartono. (2002). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Islamy, M. Irfan. (1995). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kadir, Abdul. (2002). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Kaho, Josef Riwu. (2005). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Mangkunegara, Anwar Prabu. (2006). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama.

Sedarmayanti. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

Siagian P. Sondang. (2005). *Manajemen Stratejik.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sutabri, Tata. (2005). *Sistem Informasi Manajemen.* Yogyakarta: Andi Offset

Sutanta, Edhy. (2003). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI).

Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijakan*: *Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wahyono, Teguh. (2004). *Sistem Informasi: Konsep Dasar, Analisis Desain dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wibawa, Samodra. (1994). *Kebijakan Publik Proses dan Analisis.* Jakarta: Intermedia.

Widjaja, A.W. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik:Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI).

Yani, Ahmad. (2002). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Dokumen-Dokumen

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Mewajibkan Bupati Untuk Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah.*

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah.*
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2007, serta Regulasi lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang.
15. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
16. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang.
17. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang.